

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Tahun 2016

PT AVRIST ASSURANCE

I. PENDAHULUAN	1
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	1
A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	1
B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham	43
C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/ atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	44
D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat	45
E. Rasio gaji tertinggi dan terendah	46
F. Penerapan tata kelola investasi	46
G. Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)	47
H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya	47
III. RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>)	49

I. PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance periode tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (sebelumnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian), dan telah sesuai dengan format yang ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sebagai bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pada bagian akhir laporan ini juga dilampirkan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG periode tahun 2016.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

Susunan Direksi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransia	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Supardi Suparman	Direktur	Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti	Sejak 1989	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-215/BL/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan atas nama Supardi Suparman.	22 April 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Indonesia	Indonesia

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransia	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
2.	Ibnu Hasyim	Direktur	Diploma III Bidang Ilmu Administrasi, Program Studi Aktuaria dan Perbankan, Konsentrasi Aktuaria Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia (FSAI), Persatuan Aktuaris Indonesia	Sejak Tahun 2000	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-579/NB.1/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Ibnu Hasyim	22 April 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Indonesia	Indonesia
3.	Isao Kubota	Direktur	Bachelor of Business and Commerce, Keio University	Sejak tahun 1989	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-461/NB.11/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur atas nama Isao Kubota	22 April 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Jepang	Indonesia

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransia	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
4.	Makki Ibrahim Kusuma	Direktur	Sarjana Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta	Sejak 2011	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-702/NB.11/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur atas nama Makki Ibrahim Kusuma	4 Oktober 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Indonesia	Indonesia

Profil Direksi:

1. Supardi Suparman

Supardi Suparman memiliki gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti. Saat ini Supardi menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Avrist Assurance. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai VP Comptroller, VP Admin dan Direktur selama masa jabatannya di Avrist. Selama lebih dari 21 tahun berkarir di PT Avrist Assurance, Supardi memiliki peran penting dalam proses perubahan dan perkembangan perusahaan.

Mengawali karirnya sebagai Audit Manager di KAP SGV - Utomo & Co (kini Ernst & Young), beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan, diantaranya di bidang audit, perpajakan dan asuransi seperti Audit Management Conference, AIA Comptroller Conference, AIG Leadership Breakthrough di Hongkong & China, Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

2. Ibnu Hasyim

Ibnu Hasyim lahir di Jakarta, 15 Juni 1979. Pria lulusan Universitas Indonesia jurusan Aktuaria dan Perbankan, saat ini menjabat sebagai Direktur Aktuaria & Produk PT Avrist Assurance (2013-sekarang). Sebelum menjabat di posisi tersebut, Ibnu adalah Head of Actuary & ERM Avrist.

Sebelum bergabung dengan Avrist, Ibnu memiliki pengalaman sebagai Konsultan Aktuaria pada berbagai perusahaan multinasional, diantaranya PT Eldridge Gunaprima Solutions (2000-2007) dan PT Watson Wyatt Purbajaga (2003-2006). Ibnu juga memiliki pengalaman karir yang solid sebagai Aktuaria di berbagai perusahaan asuransi jiwa baik nasional maupun multinasional, antara lain PT Mandiri Life (2000-2002), PT Sun Life Financial Indonesia (2002-2003), AIA Indonesia (2003), PT Asuransi Jiwa Generali (2011-2012) dan Head of Actuary & Risk Management Avrist (2007-2011).

Ibnu juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai Fellowship of Society of Atuary Indonesia (FSAI) di tahun 2003 dan ikut serta di berbagai seminar atau pelatihan baik sebagai peserta maupun pembicara.

3. Isao Kubota

Isao Kubota telah berkecimpung di dunia asuransi, khususnya di Jepang, selama lebih dari 25 tahun.

Lulus dari program studi Business and Commerce Keio University - Jepang di tahun 1989, Isao Kubota langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company (d/h The Yasuda Mutual Life Insurance Company). Sepanjang kariernya di Meiji Yasuda Life Insurance Company, beliau sempat memangku berbagai posisi, terakhir sebagai Group Manager Asia Business Development Group, International Business Department, dimana beliau bertugas untuk memimpin dan mengembangkan usaha asuransi jiwa di pasar Asia, termasuk usaha asuransi jiwa di Indonesia melalui PT Avrist Assurance. Sebelumnya, beliau juga dipercaya sebagai Managing Director untuk mengelola Meiji Yasuda Asia Limited (Hong Kong).

Isao Kubota resmi bergabung di Avrist sejak Agustus 2015 sebagai salah satu anggota Direksi perusahaan. Tanggung jawab pekerjaannya sebagai Direktur meliputi segala aspek dari Operasional Perusahaan.

4. Makki Ibrahim Kusuma

Setelah lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, Makki Ibrahim Kusuma memulai karirnya sebagai konsultan hukum selama 11 tahun di beberapa firma hukum di Jakarta, sebelum akhirnya berkecimpung di dunia asuransi melalui PT Avrist Assurance. Sebagai konsultan hukum, Makki juga telah memegang lisensi advokat dari PERADI sejak tahun 2007.

Sebelum dipercaya menjadi salah satu anggota Direksi PT Avrist Assurance, Makki sempat menjabat sebagai Manajer Departemen Hukum dan Sekretaris Perusahaan di tahun 2011 – 2012 dan Kepala Departemen Hukum dan Sekretaris Perusahaan di tahun 2012 – 2016.

Mulai 4 oktober 2016 sebagai salah satu anggota Direksi perusahaan, tanggung jawab Makki meliputi segala aspek dari hukum dan sekretaris perusahaan, kepatuhan, teknologi informasi, dan pengembangan *management trainee* sebagai salah satu pilar dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2016, terdapat perubahan susunan anggota Direksi, dimana susunan keanggotaan Direksi sebelumnya tampak dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	22 April 2016	30 Mei 2016
2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	22 April 2016	1 September 2016
3.	Supardi Suparman	Direktur	22 April 2016	Masih menjabat sebagai Direktur
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	22 April 2016	Masih menjabat sebagai Direktur
5.	Isao Kubota	Direktur	22 April 2016	Masih menjabat sebagai Direktur

(2) Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	Bachelor of Laws, University of Sydney	Sejak 1994	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-124/BL/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Gregory Robert Scott Crichton	22 April 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Australia	Hong Kong
2.	Taro Fujimoto	Komisaris	Bachelor of Commerce, Waseda University	Sejak 1987	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-311/NB.11/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris atas nama Taro Fujimoto.	17 May 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Jepang	Jepang

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	Master of Arts in Economics, Yale University Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia	Sejak 1994	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-66/BL/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Jannes Hutagalung	22 April 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Indonesia	Indonesia
4.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	Computer Programming & System Analyst, Deutsche Institut fuer Angewante Daten Verarbeitung, Hamburg, Jerman	Sejak 1973	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/NB.11/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Komisaris Independen atas nama Angela Andini Kalim.	29 Februari 2016	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2019	Indonesia	Indonesia

Profil Dewan Komisaris:

1. Gregory Robert Scott Crichton - Presiden Komisaris

Selama lebih dari 25 tahun, Gregory Robert Scott Crichton pernah menjabat sebagai Penasehat Umum Regional pada American International Group dan Penasehat Umum pada American International Assurance, Co. Ltd. Dalam masa jabatannya tersebut, beliau juga sempat menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Wakil Presiden Eksekutif dan dipromosikan sebagai anggota Dewan Direksi AIA pada tahun 1994, disamping juga menjabat sebagai anggota berbagai Dewan di AIG dan AIA.

Beliau pernah bekerja pada Dewan Peninjauan Pendapatan Dalam Negeri Hong Kong dan lembaga lainnya. Beliau merupakan sarjana hukum dari University of Sydney dan memiliki gelar Bachelor of Arts dari University of New South Wales. Beliau juga merupakan solicitor Mahkamah Agung Hong Kong di tahun 1995 dan solicitor Mahkamah Agung Inggris dan Wales.

Greg Chrichton ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Avrist Assurance sejak tahun 2009.

2. Taro Fujimoto - Komisaris

Setelah menerima gelar Bachelor of Commerce dari Waseda University, Jepang di tahun 1987, Taro Fujimoto langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Perjalanan karir Fujimoto lebih dari 29 tahun di Meiji Yasuda Life Insurance Company meliputi berbagai posisi, antara lain sebagai Vice President Yasuda Life America (2001 – 2003), Vice President Meiji Yasuda America (2004 – 2006), Group Manager Corporate Planning & Research Department (2006 – 2009), Group Manager Compliance Control Department (2009 – 2013), Managing Director Meiji Yasuda Europe, Limited (2013 – 2016) dan terakhir sebagai General Manager Asia Markets, International Business Department (2016 – Present).

Sejalan dengan kemitraan joint-venture Meiji Yasuda Life Insurance Company dengan PT Avrist Assurance, Fujimoto kini menjabat posisi penting sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris PT Avrist Assurance sejak Mei 2016.

3. Jannes Hutagalung - Komisaris Independen

Jannes Hutagalung adalah lulusan dari Universitas Indonesia dan Yale University, Amerika Serikat. Beliau kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avrist Assurance. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Phillips-Ralin Electronics, PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Angkasapura II.

Jannes Hutagalung sempat memegang beberapa jabatan penting di Kementerian Keuangan selama karir panjangnya di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputy Menteri untuk Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,

sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2008. Selain itu, beliau sempat bekerja selama 9 tahun di Bank Dunia, Washington DC, dimana Jannes Hutagalung juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif mewakili Grup Asia Tenggara dari tahun 1996 hingga tahun 2000.

Jannes Hutagalung mulai menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avrist Assurance sejak tahun 2009.

4. Angela Andini Kalim – Komisaris Independen

Berlatar belakang pendidikan di bidang computer programming & system analyst, Angela Andini Kalim mengawali karirnya sebagai programmer di sebuah perusahaan asuransi jiwa di Hamburg, Jerman, yaitu HanseMerkur Versicherung.

Sejak tahun 1988 sampai dengan 2010, beliau bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan membawahi bagian Policy Owner Service, Customer Service, Billing & Collection, Individual Business Process & System, Agent & Bancassurance Compensation, dan Marketing Office Support. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Assurance, Andini juga sempat menduduki posisi General Manager pada PT Blue Dot Assistance yang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa bantuan medis darurat terkemuka di Indonesia.

Berbekal pengalaman selama lebih dari 22 tahun di industri asuransi jiwa dan pengetahuan yang luas, beliau memberikan kontribusi yang berharga bagi PT Avrist Assurance sebagai Komisaris Independen pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dimana susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya tampak dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	22 April 2016	Masih menjabat sebagai Komisaris
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	22 April 2016	17 Mei 2016
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris independen	22 April 2016	Masih menjabat sebagai Komisaris

(3) Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Magister Agama (MA) Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta Dewan Syariah Nasional (SN-MUI) (bersertifikasi)	Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan Asuransi sejak tahun 2001	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-111/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Mursyidah Thahir	22 September 2014	4 tahun	Indonesia	Indonesia
2.	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Master in Syariah Economic Development , Universitas Kebangsaan Malaysia PhD in Syariah and Economic, Malaya University Malaysia	Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Avrist Assurance sejak tahun 2005	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-112/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Izzuddin Edi Siswanto	22 September 2014	4 tahun	Indonesia	Indonesia

Selama Tahun 2016 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah.

b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

Secara umum dan tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan wewenang Direksi yang tercantum pada anggaran dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- c. Membangun komunikasi yang baik diantara anggota Direksi sehubungan dengan pelaksanaan tugas masing-masing dalam mengelola Perusahaan.
- d. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
- f. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan-kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- g. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap.
- h. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite investasi, karyawan perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
- i. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
- j. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- k. Menyiapkan rencana anggaran dan bisnis Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- l. Mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya.
- n. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- o. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan Perasuransian memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- p. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum dan tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan wewenang Dewan Komisaris yang tercantum pada anggaran dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan manajemen, pelaksanaan dari manajemen pada umumnya, baik mengenai Perusahaan atau bisnisnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perusahaan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perusahaan.
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan dari semua pihak, terutama kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan / atau penerima manfaat.
- c. Menyiapkan laporan tentang kegiatan Dewan Komisaris, yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- d. Memantau efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- e. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
- f. Mempelajari dan meninjau rencana bisnis dan anggaran Perseroan sebagaimana disusun oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- g. Mempelajari dan meninjau laporan berkala dan laporan tahunan Perseroan yang telah dipersiapkan oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- h. Mengusulkan calon auditor eksternal untuk Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan masukan dari Audit Komite.
- i. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Secara umum dan tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang tercantum pada anggaran dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan pimpinan unit usaha syariah mengenai segala hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas segala produk/jasa dan kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan
- c. Bertindak sebagai mediator antara Perseroan dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPS wajib untuk senantiasa mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

c) rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Supardi Suparman	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ibnu Hasyim	Direktur	Komisaris (menjalankan fungsi pengawasan terhadap anak perusahaan)	PT Avrist General Insurance	Asuransi Umum
3.	Isao Kubota	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Makki Ibrahim Kusuma	Direktur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	Non-executive Director	Pico Far East Holdings Ltd.	Total Brand Activation
			Non-Executive Director	Pacific Harbour Asia Fund Limited	Fund Management Company
			Independent Non-Executive Director	QBE Emerging Markets Ltd.	Asuransi Umum
			Independent Non-Executive Director	Generali Life (HK) Limited	Asuransi Jiwa
2.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
3.	Taro Fujimoto	Komisaris	General Manager, Asia Markets International Business Department Meiji Yasuda Life Insurance Company (Business Execution Function)	Meiji Yasuda Life Insurance Company	Asuransi Jiwa
			Vice Chairman (Supervisory function)	Founder Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd	Asuransi Jiwa
			Director (Supervisory function)	Meiji Yasuda Asia Limited	Broker produk asuransi, penasat investasi, manajemen investasi, keuangan dan riset ekonomi dan pengembangan nasabah pada bisnis keuangan.
4.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Avrisc General Insurance	Asuransi Umum

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota DPS	PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Umum
			Anggota DPS	PT AIA Financial	Asuransi Jiwa
2	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	--	--	--

d) Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2016, seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai visi dan misi perusahaan, sebagai berikut:

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Supardi Suparman	Direktur	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
2.	Ibnu Hasyim	Direktur	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
3.	Isao Kubota	Direktur	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
4.	Makki Ibrahim Kusuma	Direktur	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
2.	Taro Fujimoto	Komisaris	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta
			<i>Peran Komite Pemantau Risiko dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris</i>	Risk Management International	30 – 31 Maret 2016	Jakarta
4.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia 2016	Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	8-9 Desember 2016	Jakarta
2.	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	<i>Compliance and Risk Management Training</i>	Talks Hukumonline.com	26 October 2016	Jakarta

e) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2015;
2. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap kinerja perusahaan dari sisi keuangan dan penjualan secara berkala melalui Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pembahasan di bulan Januari 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015;
 - b. Mengadakan pembahasan di bulan Februari 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015, dan rencana pembagian dividen perusahaan;
 - c. Mengadakan pembahasan di bulan Maret 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap draft Laporan Tahunan 2015 mencakup draft Laporan Keuangan tahun 2015;
 - d. Mengadakan pembahasan di bulan April 2016 dengan agenda utama pengesahan Laporan Tahunan 2015 mencakup Laporan Keuangan tahun 2015 yang telah di audit;
 - e. Mengadakan pembahasan di bulan May 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Maret;
 - f. Mengadakan pembahasan di bulan Juni 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Mei;
 - g. Mengadakan pembahasan di bulan Juli 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Juni;
 - h. Mengadakan pembahasan di bulan Agustus 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Juli;
 - i. Mengadakan pembahasan di bulan September 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus;
 - j. Mengadakan pembahasan di bulan Oktober 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan September, serta pembahasan perkiraan pencapaian perusahaan di akhir tahun 2016 dan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2017;
 - k. Mengadakan pembahasan di bulan November 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober; dan
 - l. Mengadakan pembahasan di bulan Desember 2016 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2016 dan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2017.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Perseroan melalui Komite-Komite yang didirikan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

Selama tahun 2016, DPS Perusahaan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat permohonan persetujuan laporan kwartalan triwulan IV tahun 2015, laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana tabarru', perusahaan dan dana investasi peserta triwulan IV tahun 2015, dan pembahasan dan persetujuan produk baru proteksi prima syariah.
2. Rapat pembasahan dan persetujuan laporan pengawasan DPS tahun 2015.
3. Rapat permohonan persetujuan laporan kwartalan triwulan I tahun 2016, dan laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru', perusahaan dan dana investasi peserta triwulan I tahun 2016.
4. Rapat permohonan persetujuan laporan kwartalan triwulan III tahun 2016, laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru', perusahaan dan dana investasi peserta triwulan I tahun 2016, dan pembahasan produk syariah dan konvensional.
5. Rapat pembahasan produk syariah dengan obligasi konvensional, dan pembahasan produk tradisional endowment syariah dengan return emas.
6. Rapat pembahasan produk tradisional endowment sharia dengan return emas.

f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

(1) Rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur * (sampai 30 Mei 2016)	5	0	100%
2.	Adie Poernomo Wijaya	Wakil Presiden Direktur * (sampai 1 September 2016)	8	0	100%
3.	Supardi Suparman	Direktur	12	0	100%
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	12	0	100%
5.	Isao Kubota	Direktur	12	0	100%
6.	Makki Ibrahim Kusuma	Direktur * (mulai bertugas sejak 4 Oktober 2016)	3	0	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama masa penugasannya di tahun 2016.

(2) Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	4	8	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris * (sampai 17 Mei 2016)	1	3	100%
3.	Taro Fujimoto	Komisaris * (mulai menjabat sejak 17 Mei 2016)	3	5	100%
4.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	4	8	100%
5.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen * (mulai bertugas Sejak 29 Feb 2016)	4	7	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama masa penugasannya di tahun 2016.

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (6 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	4	2	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris * (sampai 17 Mei 2016)	1	1	100%
3.	Taro Fujimoto	Komisaris * (mulai bertugas 17 Mei 2016)	3	1	100%
4.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	4	2	100%
5.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	4	1	100%
6.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur * (sampai dengan 30 Mei 2016)	2	1	100%
7.	Adie Poernomo Wijaya	Wakil Presiden Direktur * (sampai dengan 1 September 2016)	3	1	100%
8.	Supardi Suparman	Direktur	4	2	100%
9.	Ibnu Hasyim	Direktur	4	2	100%
10.	Isao Kubota	Direktur	4	2	100%
11.	Makki Ibrahim Kusuma	Direktur * (mulai bertugas sejak 4 Oktober 2016)	1	1	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama masa penugasannya di tahun 2016.

(4) Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	12	--	100%
2.	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	12	--	100%

(5) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (1 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	1	--	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris * (sampai 17 Mei 2016)	1	--	100%
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	1	--	100%
4.	Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	1	--	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama masa penugasannya di tahun 2016.

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:

a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

Secara umum setiap Department atau unit kerja memiliki pengendalian intern yang melekat dalam prosedur kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing department. Kepala department bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh karyawan atau unit kerja yang berada dibawah supervisinya. Selanjutnya Internal Audit Department memiliki fungsi untuk melakukan review atas pelaksanaan prosedur dan penilaian atas pengendalian internal dari department yang akan di audit dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ada penyimpangan maupun kelemahan prosedur.

b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

(1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas :

(i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi merupakan salah satu komite manajemen perusahaan dimana Direktur dengan Fungsi Investasi mendelegasikan kewenangan kepada Komite Investasi untuk melakukan pengawasan atas seluruh portfolio investasi perusahaan.

Rapat Komite Investasi dilakukan paling tidak 1 kali dalam 3 bulan. Rapat dianggap memenuhi kuorum jika dihadiri oleh seluruh anggota Komite Investasi atau lebih dari 50% dari jumlah komite investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- (1) President Direktur (Direktur perusahaan yang membawahi bidang Business Development, Marketing & Corporate Communication, dan Investment)
- (2) Direktur Actuary Perusahaan (Direktur perusahaan yang membawahi bidang Actuary, Product Development, dan Risk Management)
- (3) Direktur Keuangan (Direktur perusahaan yang membawahi bidang Finance & Accounting, General Service, and CSR)
- (4) Independent Advisor & ERM Expert
- (5) Aktuarist Perusahaan (Kepala Fungsi Actuary)
- (6) Kepala Fungsi Investasi (Koordinator dan tenaga ahli perusahaan dalam bidang Investasi)

(b) Komite Pengembangan Produk

Dalam menjalankan fungsi pengendalian intern perusahaan khususnya untuk membuat sebuah produk baru maupun memodifikasi produk existing diskusi awal akan dilakukan di dalam forum Komite Pengembangan Produk/ Product Development Committee (PDC), dimana keanggotaannya terbatas hanya pada jajaran direksi serta department head terkait.

Adapun diskusi dilakukan didalam komite pengembangan produk adalah membahas ide produk baru atau memodifikasi produk yang telah ada dan dituangkan oleh tim produk dalam ringkasan produk beserta batas waktu pelaksanaannya, setelah ide tersebut di setujui oleh PDC, selanjutnya ringkasan produk diberikan kepada bagian Aktuaria untuk dihitung (*pricing*) preminya, *Value Of New Business*, cadangan dan biayanya. Setelah *pricing* dilakukan team Aktuaria, team PDC akan berdiskusi kembali mengenai produk tersebut, sekiranya produk tersebut mendapatkan persetujuan

maka ringkasan produk akan diteruskan kembali ke produk team untuk seterusnya memulai pengembangan produk tersebut bekerja sama dengan departemen lain yang tergabung dalam PIC (Product Implementation Committee) sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam PDC.

Adapun keanggotaan PDC beserta keahliannya antara lain adalah;

1. BOD : Memberikan pertimbangan, masukan dan persetujuan dilihat dari kepentingan perusahaan secara umum
2. Product Dept. Head : Memberikan ide bagi produk baru ataupun memodifikasi atas produk yang sudah ada beserta analisa pesaing terhadap ide tersebut.
3. Operation Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi underwriting, claim dan POS perusahaan
4. Legal Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi keabsahan produk serta peraturan yang berlaku
5. Actuarial Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi perhitungan keuntungan perusahaan.
6. IT Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi kemampuan supporting system
7. Distribution Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi penjualan dan kondisi pasar saat ini

(ii) tugas dan tanggung jawab komite.

(a) Komite Investasi

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Investasi perusahaan, termasuk kelas asset, alokasi asset dan batasan investasi.
- (2) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana/Strategi Investasi perusahaan, termasuk kelas asset dan rencana komposisi asset.
- (3) Mengevaluasi setiap penyimpangan investasi dan memonitor rencana tindak lanjutnya.
- (4) Mengevaluasi secara berkala Kebijakan Investasi dan Rencana/Strategi Investasi perusahaan dalam hal terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai investasi perusahaan asuransi, beserta memberikan rekomendasi dalam hal terdapat perubahan Kebijakan dan/atau Rencana/Strategi Investasi perusahaan.
- (5) Memonitor dan mengevaluasi kinerja portfolio investasi, termasuk kesesuaian antara durasi asset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan, beserta perbandingan antara hasil kinerja investasi dengan tolak ukur (benchmark) maupun target imbal hasil yang telah ditentukan.
- (6) Mengevaluasi kondisi makro ekonomi dan pasar modal, baik domestic maupun global, serta pengaruhnya terhadap strategi investasi perusahaan.
- (7) Melakukan seleksi, menetapkan dan mengevaluasi secara berkala pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia jasa layanan (service providers) seperti bank rekanan, broker, bank custodian dan manager investasi.
- (8) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk penempatan kelas asset yang berkaitan dengan resiko kredit (obligasi korporasi).

(b) Komite Pengembangan Produk

Dalam memastikan pembuatan produk baru maupun modifikasi atas produk yang sudah ada, telah berjalan sesuai dengan batas waktu yang disetujui, PDC juga dapat memberikan pertimbangan, masukan serta persetujuan atas manfaat / *feature* produk dan hasil *pricing* yang diajukan oleh tim produk. Selain itu PDC juga dapat mengawasi ketepatan batas waktu yang harus di penuhi oleh masing-masing department.

(iii) frekuensi rapat komite.

(a) Rapat komite investasi.

No	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Investasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Bapak Perry M. Diah * (sampai dengan 30 Mei 2016)	2	100
2.	Bapak Ibnu Hasyim	4	100
3	Bapak Supardi Suparman	4	100
4	Bapak Manggi Habir	4	100
5	Cunardi Tju	4	100
6	Anna Leonita	4	100

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama masa penugasannya di tahun 2016.

(b) Rapat komite pengembangan produk

No	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Pengembangan Produk	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Ibnu Hasyim	1	100
2.	Vinia Lestianti Erwin	1	100
3.	Akiji Shimomachi	1	100
4.	Rudiman	1	100
5	Ely Aswita	1	100
6	Rizki Supardan	1	100
7	Leonardus Sunioto	1	100

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

(a) Komite Investasi

1. Pemberian persetujuan Komite Investasi atas Rencana/Strategi Investasi perusahaan tahun 2016
2. Pemberian persetujuan Komite Investasi atas pembelian obligasi korporasi
3. Evaluasi Kinerja Investasi Perusahaan untuk 2Q dan 3Q dan keputusan untuk melakukan meeting setiap bulan di 3Q2016 dengan pertimbangan situasi market yang sangat fluktuatif
4. Pembahasan awal untuk penerapan Strategi Investasi tahun 2017

(b) komite pengembangan produk

Sepanjang tahun 2016 tim product development memberikan beberapa design produk baru dan modifikasi existing produk ke PDC. Design produk yang disetujui oleh PDC dan dilaksanakan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Modifikasi produk Wealth Enhancer untuk bancassurance yaitu perubahan Crediting rate yang realisasinya terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember
2. Modifikasi produk Avrist SEHATI dengan menambahkan *family package* dan tambahan *rider* dimana realisasinya pada bulan Juni
3. Produk Wealth Enhancer – Produk Single Endowment Rupiah untuk channel Agency yang diluncurkan pada bulan Oktober
4. Menambahkan fitur produk Wealth Enhancer melalui jalur Bancassurance untuk memfasilitasi program Tax Amnesty yang realisasinya pada bulan Oktober

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:

(i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite.

Struktur keanggotaan, keahlian, dan independensi komite pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen, dengan anggota direktur yang memiliki keahlian dibidang hukum dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang audit, keuangan dan akuntansi.
2. Ketua Komite Pemantau Resiko adalah Komisaris Independen, dengan anggota komisaris independen, direktur yang memiliki keahlian dibidang risk managent dan 2 orang pihak external yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama dengan anggotanya adalah komisaris, komisaris independen dan presiden direktur.
4. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komisaris Independen, dengan anggota direktur bidang kepatuhan, anggota DPS, komisaris independen dari anak perusahaan dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang tata kelola.

(ii) tugas dan tanggungjawab komite;

(a) Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan yang terkait dengan audit

(b) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko.
2. Membantu dewan komisaris dalam menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
3. Menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi perusahaan yang terkait dengan manajemen risiko
4. Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian tugas manajemen risiko.

(c) Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Mempelajari peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi.
2. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistim remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel.
3. Membantu dewan komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi komisaris, direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS.
4. Mengevaluasi sistim imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya.
5. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya dalam perusahaan.
6. Membuat sistim penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan.
7. Mencari calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
8. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

(d) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Membantu dewan komisaris dalam mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi perusahaan.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan dan anak perusahaan.
4. Menyiapkan laporan tahunan Tata Kelola Perusahaan serta melaporkan kejadian penting yang terkait tata kelola perusahaan kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat.

(iii) frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Audit

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Audit (12 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Jannes Hutagalung	12 kali	100%
2.	M.P. Sibarani	12 kali	100%
3.	Adi Purnomo Widjaya <i>*(penugasan sampai dengan 31 Agustus 2016)</i>	8 kali	100%
4.	Makki I. Kusuma <i>*(penugasan mulai 3 Oktober 2016)</i>	3 kali	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama penugasannya di tahun 2016.

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko (5 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Angela Andini Kalim * (penugasan mulai 29 Feb 2016)	4	100%
2.	Taro Fujimoto * (penugasan mulai 17 Mei 2016).	4	100%
3.	Manggi Habir	4	80%
4.	Masdar	4	80%
5.	Ibnu Hasyim	5	100%
6.	Jannes Hutagalung * (penugasan sampai dengan 28 Feb 2016)	1	100%
7.	Kazunori Yamauchi * (penugasan sampai 17 Mei 2016)	1	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama penugasannya di tahun 2016.

(c) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (4 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Gregory Crichton	4	100%
2.	Kazunori Yamauchi * (penugasan sampai 17 Mei 2016)	2	100%
3.	Jannes Hutagalung	4	100%
4.	Taro Fujimoto * (penugasan mulai 17 Mei 2016).	2	100%

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama penugasannya di tahun 2016.

(d) Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi (5 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Jannes Hutagalung	5	100
2.	M.P. Sibarani	5	100
3.	Adi Purnomo Widjaya *(penugasan sampai dengan 31 Agustus 2016)	4	100
4.	Makki I. Kusuma *(penugasan mulai 3 Oktober 2016)	1	100
5.	Angela Andini Kalim *(penugasan mulai 17 Mei 2016)	3	100
6.	Izzuddin Edi Siswanto *(penugasan mulai 17 Mei 2016)	3	100

* Menghadiri seluruh rapat yang diadakan selama penugasannya di tahun 2016.

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

1. Komite audit melakukan review atas kinerja Internal Audit sesuai dengan rencana audit tahunan yang sudah ditetapkan, dan membuat laporan audit komite atas aktivitas yang dilakukan serta saran dan rekomendasi perbaikan atas temuan audit, termasuk memberikan rekomendasi untuk pemilihan external auditor.
2. Komite pemantau risiko melakukan pemantauan risiko yang ada di perusahaan secara berkala dengan mengidentifikasi risiko yang ada (*Capital Risk; Asset and Liability Risk; Rider claim ratios, renewal Premium persistency ; Cash Flow Position ; Claim ratio of Group Medical products; Management Composition Risk; Cyber Attacks Risk; Data Lost and Business Continuity Management risk ; Compliance Risk*) beserta mitigasinya.
3. Komite Pemantau Risiko juga telah memantau perkembangan *Management Composition Risk and Compliance* (terkait proses Fit and Proper Test untuk Presiden Direktur), *Capital Risk* (terkait RBC ratio, net profit to net premium ratio, Return on Equity and Return on Asset), *Asset and Liability Risk* (terkait duration gap), *Cash Flow Position, Claim ratio of Group Medical products, Cyber Attacks Risk, Data Lost and Business Continuity Management risk*.
4. Komite nominasi dan remunerasi mengevaluasi dan membahas kinerja direksi dan perusahaan
5. Komite Tata kelola terintegrasi melakukan review dan pengesahan atas laporan tahunan tata kelola perusahaan dan revisi atas Pedoman Anti Pencucian Uang.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

a) Fungsi kepatuhan.

(1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Avrist telah memiliki Compliance Department yang berfungsi untuk mengawasi kepatuhan bisnis unit terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada manajemen dan bisnis unit terkait sehingga seluruh aktivitas bisnis selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Compliance Department bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya secara langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

(2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum.

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Per 31 Desember	2.442.153.184.269	1.768.217.360.569	1.614.258.381.578	1.568.059.331.761	1.943.808.065.993

(3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

(i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan.

Tingkat Solvabilitas Per 31 Desember	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat solvabilitas Perusahaan	1.595.198.337.778	1.013.495.328.902	887.384.152.124	908.132.761.811	1.293.779.721.729
Dana Tabarru'	2.009.633.835	3.583.342.097	6.670.402.752	11.859.941.035	14.631.453.725
Dana Perusahaan	69.531.167.644	94.761.795.558	116.253.612.608	145.116.832.511	164.713.584.553

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan.

Rasio Likuiditas Per 31 Desember	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio likuiditas Perusahaan	216,01	231,51	227,19	263,77	237,68
Dana Tabarru'	156,56	336,91	700,02	895,30	513,06

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan.

Rasio Kecukupan Investasi Per 31 Desember	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio kecukupan investasi Perusahaan	189,99	161,10	157,15	145,26	154,25
Dana Tabarru'	148,91	195,74	179,46	227,21	207,64

(4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

No	Aktivitas	Jumlah Laporan tahun 2016
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (<i>CTR</i>) kepada PPATK	NIHIL
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>STR</i>) kepada PPATK	5
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait <i>CTR</i> dan <i>STR</i> dari: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	19
4.	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	NIHIL

(5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	Head of Operation	Dr. Solaiman Arif
2.	Customer Service	Ade Sjamsoedin

Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah akan ditangani oleh Customer Service unit yang bertanggung jawab langsung kepada kepala departemen operation. Customer service unit juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan departemen terkait lainnya untuk mendukung penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Fungsi auditor internal.

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

(1) ruang lingkup pekerjaan audit.

Melakukan pemeriksaan dan review internal control (operation dan financial audit) baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Pemasaran berdasarkan rencana audit tahunan yang di sahkan oleh Komite Audit.

(2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal.

Independen department yang melapor langsung (garis lurus) kepada Komite Audit dan secara internal Perusahaan melapor (garis putus-putus / dotted line) kepada President Direktur

(3) independensi auditor internal.

Departmen internal audit bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat bertindak secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh departmen lainnya.

(4) uraian tugas satuan kerja.

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit untuk mengevaluasi efektivitas proses kerja yang ada di Perusahaan
- Membuat laporan audit yang meliputi identifikasi temuan, rekomendasi pengendalian dan kesimpulan yang menyeluruh serta melaporkannya kepada Manajemen
- Melaksanakan proses tindak lanjut atas temuan audit secara berkala dan menyampaikan laporan berkala tersebut kepada Direksi dan Komite Audit
- Ikut serta dalam proyek – proyek yang diadakan Perusahaan berdasarkan permintaan dari Direksi dan persetujuan dari Komite Audit
- Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada unit bisnis yang memerlukan untuk meningkatkan efektivitas dan tindakan perbaikan pengendalian internal dan operasional perusahaan.
- Melaporkan aktivitas audit internal kepada Direksi dan Komite Audit
- Membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan personel di unit kerja Perusahaan, Auditor Eksternal dan Organisasi lain yang relevan.

(5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal.

Pada posisi 31 Desember 2016 jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 4 pegawai

(6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

Selama tahun 2016 internal audit telah melakukan:

- Audit Group Insurance – phase 2
- Audit Kantor Pemasaran Semarang – verifikasi laporan
- Project Non Sales Activities di Kantor Pemasaran
- Review Prosedur terkait Aktivitas Operasional di Kantor Pemasaran
- Audit Kantor Pemasaran Surabaya – verifikasi laporan

- Audit Human Resources Department
 - Audit Review Implementasi Peraturan AML/KYC di Individu, Group Asuransi dan Tenaga Pemasaran
- Seluruh laporan hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Komite Audit.

c) Fungsi auditor eksternal

Auditor external telah melaksanakan tugasnya dengan efektif, perusahaan telah menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yasir
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yasir
2014	KAP Purwantono, suherman & Surja	Hermawan Setiadi
2013	KAP Purwantono, suherman & Surja	Indrajuwana Komala Widjaja
2012	KAP Purwantono, suherman & Surja	Hermawan Setiadi
2011	KAP Purwantono, suherman & Surja	Hermawan Setiadi

4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Direksi dan Dewan Komisaris menyusun dan menyetujui rencana strategi dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko terhadap kejadian Risiko Operasional yang mungkin terjadi dalam Perusahaan termasuk langkah-langkah mitigasi yang akan diambil untuk meminimalisir terjadinya kejadian Risiko Operasional di Perusahaan.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak mempengaruhi bisnis Perusahaan secara negatif, dan tidak mengganggu solvabilitas perusahaan.
- Direksi memastikan bahwa Perusahaan tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
- Direksi dan Dewan Komisaris menginformasikan dan mengingatkan pemegang saham ketika dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai ketentuan terkait penunjukkan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada Perusahaan dan diikuti oleh semua pihak di dalam Perusahaan.

- Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa Perusahaan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan permodalan dilakukan dengan baik sehingga Perusahaan memiliki solvabilitas yang memadai, dimana kemampuan permodalan Perusahaan dapat menyerap kerugian yang tak terduga.

b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

- Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap risiko strategi yang dimiliki oleh Perusahaan.
- Perusahaan menetapkan rencana strategi dan dampak dari strategi tersebut terhadap bisnis Perusahaan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana strategi dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari strategi tersebut.
- Strategi, rencana kerja, dan kebijakan dalam pengelolaan aset dan liabilitas mencakup komposisi aset dan liabilitas, tingkat aset yang dipelihara Perusahaan, diversifikasi investasi; dan limit Risiko Aset dan Liabilitas.
- Komite manajemen risiko melakukan monitoring terhadap perubahan dan pergerakan dalam aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan secara berkala.
- Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan kepengurusan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencakup antara lain aspek penunjukan dan pemberhentian dan kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris, penelusuran rekam jejak calon Direksi/Dewan Komisaris dan aspek lainnya yang berkaitan.
- Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa tata kelola dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencakup antara lain aspek nilai strategis dari Perusahaan (seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas), aspek kepatuhan dalam kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris, kepatuhan dalam aspek pedoman kode etik dan AML (Anti-Money Laundering).
- Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa minimum rasio pencapaian tingkat solvabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cukup untuk mengatasi kerugian tidak terduga.
- Penyusunan strategi mitigasi untuk Risiko Operasional mencakup antara lain menerapkan prinsip pengamanan aset dan data serta business continuity management yang memadai, memiliki struktur organisasi yang mendukung pola kerja Perusahaan, memiliki perangkat komputer, sistem teknologi informasi, ruangan kerja, peralatan kantor, sistem administrasi yang menunjang kegiatan Perusahaan, dan lain-lain.
- Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan aktuarial dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencakup antara lain aspek pengendalian rasio klaim, pengelolaan cadangan teknis aktuarial, kebijakan penetapan premi dan underwriting, pengelolaan reasuransi, dan aspek lainnya yang berkaitan.

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko mencakup Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset dan Liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, Risiko Permodalan, Risiko Asuransi. Proses penerapannya mencakup elemen quantitative dan qualitative dari masing-masing risiko.

d) sistem informasi manajemen risiko.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung pelaporan risiko. Software aplikasi actuarial Prophet memungkinkan akses terhadap data cadangan teknis actuarial yang diperlukan untuk monitoring terhadap perubahan dan pergerakan dalam liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan secara berkala. Software aplikasi SUN System dan aplikasi Bloomberg memungkinkan akses terhadap data aset dan investasi perusahaan yang diperlukan untuk monitoring terhadap perubahan dan pergerakan dalam aset yang dimiliki oleh Perusahaan secara berkala. Sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen ini juga mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sistem informasi manajemen dan informasi yang dihasilkan ini juga telah sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.

e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan memiliki sistem pengendalian intern yang mencakup wewenang, independensi dan objektivitas Risk Management Department dalam melakukan analisis, evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan Risiko secara berkala dari waktu ke waktu. Termasuk pemantauan secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan atas kelemahan dalam strategi dan kebijakan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan perbaikan (koreksi) atas penyimpangan yang terjadi. Analisis dan evaluasi yang dimaksud dapat mencakup antara lain strategi dan kebijakan, alokasi sumber daya, desain proses, sistem informasi dan pelaporan, peraturan dan praktik terbaik (best practice).

5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

- (1) kebijakan remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, adalah antara lain berupa gaji, tunjangan hari raya dan/ atau bonus.
- (2) fasilitas lain dalam bentuk natura/non naturayaitu penghasilan tidak tetap lainnya adalah antara lain berupa asuransi kesehatan, transportasi dan fasilitas/ sarana telekomunikasi telepon seluler/ mobile phone.

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.

(1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk direksi adalah berupa Gaji, THR, Bonus, Asuransi Kesehatan, Transportasi, dan Mobile Phone. Untuk Dewan Komisaris adalah berupa gaji dan transportasi. Untuk Dewan Pengawas Syariah berupa gaji dan tunjangan hari raya.

- (2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (<i>benefit</i>), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)	5	15.136	4	3.230	2	208
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).	5	2.396	4	418	-	-
Total	5	17.532	4	3.648	2	208

(3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	5		
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar		1	
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar		2	
Rp500juta ke bawah		1	2

Keterangan:

*) yang diminta secara tunai

6) Rencana strategis Perusahaan.

- a) rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana korporasi Perseroan mencakup rencana-rencana perusahaan di bidang investasi, pengembangan jalur distribusi dan pemasaran produk, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem teknologi informasi dalam perusahaan.

Kedepannya, Perseroan berharap dapat memberikan nilai yang optimal tidak hanya kepada para Pemegang Saham tetapi juga terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui rangkaian kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh Perseroan baik saat ini maupun yang akan datang, masyarakat dapat mengumpulkan banyak manfaat, antara lain pengganti penghasilan, dana pendidikan bagi anak-anak, dana perawatan kesehatan dan kecelakaan, serta pengakumulasian dan pengembangan aset.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan pencapaian Annualized Nett Premium (ANP) sebesar Rp 1,2 Trilyun, atau 3 (tiga) kali lipat dari proyeksi pencapaian ANP di tahun 2015. Dari sisi pendapatan bisnis baru, Perseroan juga menargetkan untuk melipat gandakan Value of New Business (VoNB) sampai dengan 3 (tiga) kali lipat dibandingkan proyeksi tahun 2015, atau sebesar Rp 492 Milyar. Untuk tahun 2019, Perseroan juga menargetkan untuk mendapatkan laba (setelah pajak) sebesar Rp 579 Milyar, atau 2 (dua) kali lipat dari proyeksi laba di tahun 2015.

- b) rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Yang menjadi target jangka pendek dan menengah yang utama bagi Avrist tentunya adalah pertumbuhan modal, asset, premi, serta kesehatan keuangan yang akan bermuara pada semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan. Dengan keberhasilan Avrist dalam membukukan tingkat profitabilitas yang konsisten ditambah tingkat likuiditas perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis dan akan memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan adanya tingkat pertumbuhan.

Untuk 3 tahun ke depan, dapat diproyeksikan bahwa perusahaan akan memiliki kekayaan melebihi Rp 11.8 Trilyun dan ekuitas sebesar Rp 3 Trilyun. Penempatan investasi unit-linked diasumsikan proporsional mengikuti alokasi aset per September 2016 untuk tahun-tahun kedepan. Untuk non unit-linked, perusahaan masih akan melakukan penempatan secara signifikan pada surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta pada reksadana berpendapatan tetap. Selama 3 (tiga) tahun ke depan perusahaan juga diperkirakan akan tetap dapat menjaga kestabilan arus kas dan memaksimalkan perolehan dari investasi. Dengan demikian perusahaan juga diproyeksikan akan mampu melakukan pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis serta biaya-biaya lainnya tanpa harus menjual investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam 3 (tiga) tahun ke depan, modal berbasis risiko yang dimiliki perusahaan masih akan dalam kondisi yang baik dan tidak memerlukan tambahan suntikan modal dari para pemegang saham perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan juga masih sangat besar sehingga memberikan jaminan untuk pembayaran manfaat.

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Hasil pemeringkatan atas kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Fitch sebagai lembaga pemeringkat pada bulan November 2016 adalah “AA- Stable”. Rating tersebut telah dipertahankan oleh perusahaan sejak tahun 2012. Transparansi tentang produk produk asuransi Avrist dapat ditemukan dalam brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam *website* perusahaan. Setiap pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui Customer Service/ Call Center Avrist.

8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	alasan pemilihan pihak lain
1.	Office Boy & Driver	PT KPSG	SIUP no 02980-04/PB/P1/1.824.271	1 tahun	bukan posisi inti dalam bisnis proses perusahaan

9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:

a) pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS.

Pada tanggal 22 April 2016, Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana Pemegang Saham Perseroan telah memutuskan antara lain (i) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2015, (ii) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun 2015 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja, (iii) Menyetujui pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan, (iv) Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (melalui Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016, dan (v) Menyetujui pembebasan tanggung jawab (*ecquit et de charge*) bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh tindakan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 dan penunjukkan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan juga mengambil keputusan pada tanggal 25 Oktober 2016 sehubungan dengan persetujuan dan ratifikasi rencana anggaran dan bisnis tahun 2017 Perseroan.

b) proses pengumuman dan pemanggilan RUPS.

Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, RUPS masih diharapkan untuk dapat memberikan persetujuan pengangkatan Presiden Direktur Perseroan. Perseroan telah mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon Presiden Direktur kepada OJK pada tanggal 29 November 2016.

10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen.

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan, dilakukan oleh komisaris independen dengan berbagai kegiatan melalui sarana rapat dewan komisaris, direksi dan rapat komite yang didalamnya terdapat komisaris independen sebagai ketua maupun sebagai anggota komite.

Tabel di bawah ini menggambarkan aktivitas komisaris independen dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas:

No.	Tanggal	Keterangan
Rapat Dewan Komisaris		
1.	29 Januari 2016	Melakukan pembahasan sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Desember 2015.
2.	2 Februari 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode tahun 2015; 2. Rencana pembagian dividen bagi pemegang saham; 3. Modified Acquisition Cost/Financial Reinsurance; dan 4. Proyek strategis perusahaan.
3.	23 Maret 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Draft laporan tahunan 2015 perusahaan; dan 2. Kinerja perusahaan periode YTD – Januari 2016.
4.	22 April 2016	Melakukan pengesahan atas Laporan Tahunan 2015.
5.	17 Mei 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Maret 2016.
6.	30 Juni 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Mei 2016.
7.	29 Juli 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Juni 2016.
8.	29 Agustus 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Juli 2016.
9.	30 September 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Agustus 2016.
10.	25 Oktober 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Agustus 2016, Estimasi Produksi Akhir Tahun 2016, dan draft rencana kerja dan anggaran tahun 2017.

No.	Tanggal	Keterangan
11.	30 November 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Oktober 2016.
12.	6 Desember 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan Estimasi Produksi Akhir Tahun 2016, dan draft rencana kerja dan anggaran tahun 2017.
Rapat Komite Audit		
1.	28 Januari 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Internal Audit Plan 2016 2. Aktivitas Internal Audit – Januari 2016. 3. Pelaksanaan Company Project 4. Pelaksanaan Follow Up Open Audit Issues – Status 31 Desember 2015
2.	24 Februari 2016 (C)	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – Februari 2016 2. Progress Company Project 3. Hasil Follow Up Open Audit Issues – Status 31 Desember 2015
3.	17 Maret 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – Maret 2016. 2. Pembahasan progress Company Project 3. Hasil Follow Up Open Audit Issues – Status 29 Februari 2016
4.	5 April 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – April 2016 2. Pembahasan progress Company project 3. Pelaksanaan Follow Up Open Audit Issues – Status 31 Maret 2016 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit tahun keuangan 2016
5.	12 Mei 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit tim – Mei 2016 2. Pembahasan progress Company Project 3. Hasil Follow Up Open Audit Issues – Status 31 Maret 2016
6.	24 Juni 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – Juni 2016 2. Menyampaikan Laporan Final Company Project
7.	29 Juli 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – Juli 2016 2. Pelaksanaan Follow Up Open Audit Issues – Status 30 Juni 2016
8.	22 Agustus 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – Agustus 2016 2. Hasil Follow Up Open Audit Issues – Status 30 Juni 2016

No.	Tanggal	Keterangan
9.	28 September 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit – September 2016 2. Pelaksanaan Follow Up Open Audit Issues – Status 30 September 2016
10.	17 Oktober 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit- Oktober 2016 2. Hasil Follow Up Open Audit Issues – Status 30 September 2016
11.	23 November 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit November 2016 2. Pelaksanaan Company Project
12.	27 Desember 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas Internal Audit Desember 2016 2. Progress Company Project
Rapat Komite Pemantauan Risiko		
1.	6 Januari 2016	Melakukan pembahasan antara lain sehubungan dengan: 1. Risk Profile Assessment (No. 10/POJK.05/2014) 2. Capital Risk 3. Asset and Liability Risk 4. Cash Flow Position Risk 5. Claim ratio of Group Medical products 6. Actuarial Risk 7. Management Composition Risk 8. Compliance Risk
2.	19 September 2016	Melakukan pembahasan antara lain sehubungan dengan: 1. Management Composition Risk 2. Capital Risk 3. Asset and Liability Risk 4. Cash Flow Position Risk 5. Claim ratio of Group Medical products 6. Actuarial Risk 7. Cyber Attacks Risk 8. Data Lost risk 9. Business Continuity Management risk 10. Compliance Risk 11. Concentration in business counterparties of bancassurance channel

No.	Tanggal	Keterangan
3.	26 October 2016	Melakukan pembahasan antara lain sehubungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Management Composition Risk 2. Capital Risk 3. Asset and Liability Risk 4. Cash Flow Position Risk 5. Claim ratio of Group Medical products 6. Actuarial Risk 7. Cyber Attacks Risk 8. Data Lost risk 9. Business Continuity Management risk 10. Compliance Risk 11. Concentration in business counterparties of bancassurance channel 12. Return on Equity and Return on Asset in industry.
4.	17 November 2016	Melakukan pembahasan antara lain sehubungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Management Composition Risk 2. Capital Risk 3. Asset and Liability Risk 4. Cash Flow Position Risk 5. Claim ratio of Group Medical products 6. Actuarial Risk 7. Cyber Attacks Risk 8. Data Lost risk 9. Business Continuity Management risk 10. Compliance Risk 11. Concentration in business counterparties of bancassurance channel 12. RBC ratio in industry
5.	21 December 2016	Melakukan pembahasan antara lain sehubungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Management Composition Risk 2. Capital Risk 3. Asset and Liability Risk 4. Cash Flow Position Risk 5. Claim ratio of Group Medical products 6. Actuarial Risk 7. Cyber Attacks Risk 8. Data Lost risk

No.	Tanggal	Keterangan
		9. Business Continuity Management risk 10. Compliance Risk 11. Concentration in business counterparties of bancassurance channel
Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi		
1.	22 Feb 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1.Laporan Komisaris independen tahun 2015 2.Laporan GCG tahun 2015 dan self-assessment GCG
2.	18 April 2016	Pelaksanaan pelaporan AML periode Januari – Maret 2016
3.	14 Juni 2016	1. Persetujuan revisi AML guideline 2016 2. Finalisasi Board Manual
4.	22 Juli 2016	Pelaksanaan pelaporan AML periode April – Juni 2016
5.	18 Oktober 2016	Pelaksanaan pelaporan AML periode Juli – September 2016
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
1.	22 Maret 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan <i>Key Performance Indicator</i> Direksi.
2.	16 Mei 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan <i>Key Performance Indicator</i> Direksi.
3.	30 August 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan <i>Key Performance Indicator</i> Direksi, dan kandidat Presiden Direktur.
4.	26 Oktober 2016	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan <i>Key Performance Indicator</i> Direksi, dan kandidat Presiden Direktur.

11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi

PT Avrist Assurance tidak bekerja sama dengan perusahaan agen asuransi. Dalam memasarkan produk asuransinya melalui agency, seluruh agen Avrist telah terdaftar di asosiasi terkait dibawah naungan PT Avrist Assurance. Pada posisi 31 Desember 2016 Avrist mempunyai 4.313 agen asuransi jiwa, sudah termasuk 1.680 agen asuransi jiwa syariah. Seluruh agen tersebut memiliki setifikat keagenan yang masih berlaku dari asosiasi terkait yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Setiap agen tersebut sebagai individu telah menandatangani perjanjian kerjasama keagenan dengan PT Avrist Assurance

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

Nama	Jabatan	kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Supardi Suparman	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Ibnu Hasyim	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Isao Kubota	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Makki Ibrahim Kusuma	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Taro Fujimoto	Komisaris	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Angela Andini Kalim	Komisaris Independen	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Supardi Suparman		√			√			√			√	
Ibnu Hasyim		√			√			√			√	
Isao Kubota		√			√			√			√	
Makki Ibrahim Kusuma		√			√			√			√	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Supardi Suparman		√			√			√			√	
Ibnu Hasyim		√			√			√			√	
Isao Kubota		√			√			√			√	
Makki Ibrahim Kusuma		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Gregory Robert Scott Crichton		√			√			√			√	
Taro Fujimoto		√			√			√			√	
Jannes Hutagalung		√			√			√			√	
Angela Andini Kalim		√			√			√			√	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Gregory Robert Scott Crichton		√			√			√			√	
Taro Fujimoto		√			√			√			√	
Jannes Hutagalung		√			√			√			√	
Angela Andini Kalim		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb.

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb.

E. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Rasio	Skala Perbandingan
rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	93.6
rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1.4
rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	3.8
rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.7

F. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:

1) kebijakan dan strategi investasi.

Kebijakan dan Strategi Investasi untuk asset perusahaan asuransi Avrist Assurance mengacu kepada kebijakan investasi perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014. Kebijakan dan Strategi Investasi untuk unit bisnis Syariah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014.

Kebijakan Investasi disusun dan disetujui oleh Komite Investasi perusahaan, dan direview secara ad-hoc basis jika terjadi perubahan peraturan dan perubahan lain yang mengakibatkan Kebijakan Investasi yang ada menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana/Strategi Investasi disusun minimum setahun sekali dan di-review secara berkala untuk memastikan implementasi strategi investasi sudah sesuai dengan Rencana/Strategi Investasi yang telah disusun dan disetujui oleh Komite Investasi.

2) pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi.

Pengelolaan investasi mengacu pada resiko-resiko investasi yang telah dijabarkan dalam kebijakan investasi, dan pengawasan secara berkala juga dilakukan terhadap kesesuaian antara durasi asset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan kepada pemegang polis.

3) pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, apabila ada.

Untuk optimasi investasi Avrist juga melakukan pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, yaitu PT. Bahana TCW Investment Management dan PT. BNP Paribas Investment Partner

G. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Penyimpangan internal dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total penyimpangan	--	--	--	1	1	--
Telah diselesaikan	--	--	--	1	1	--
Dalam proses penyelesaian di internal	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaian	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2016 terdapat 1 penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap, namun penyimpangan tersebut tidak material dan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perusahaan.

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Tidak ada pengundiran diri ataupun pemberhentian auditor external selama tahun 2016.

2) transaksi material dengan pihak terkait;
Secara garis besar transaksi dengan pihak terkait dapat dilihat pada table berikut:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi yang signifikan/ Significant transactions
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Avrist ("DPLK Avrist")	Pendiri, Personil manajemen kunci/ <i>Founder, The key management personel</i>	Jasa administrasi investasi/ <i>Investments administration services fees</i>
Dana Pensiun Pemberi Kerja Avrist ("DPPK Avrist")	Pendiri, Personil manajemen kunci/ <i>Founder, The key management personel</i>	Jasa administrasi investasi/ <i>Investments administration services fees</i>
Meiji Yasuda Life Insurance Company	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Pembayaran uang muka/ <i>Advance payment</i>
Reksa dana dibawah manajemen AAM/ <i>Mutual funds under management of AAM</i>	Manajemen portofolio dan investasi/ <i>Portfolio management and investment</i>	Investasi dalam reksa dana/ <i>Investment in unit of mutual funds</i>

3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan.

No	Lini Usaha	Objek Pertanggung	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.

Selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perusahaan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Selama tahun 2016 tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan

Permasalahan hukum selama tahun 2016 tampak pada tabel berikut.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: a. Perdata b. Pidana	1 -	- -
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata: a. Perdata b. Pidana	2 -	- -
Total	3	--

III. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

